

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, secara umum institusi keuangan digolongkan menjadi dua kategori, yakni institusi keuangan bank dan institusi keuangan non-bank. Salah satu institusi keuangan non-bank yang hidup, tumbuh dan berkembang di Bali yakni Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Lembaga keuangan ini yakni suatu entitas bisnis yang dimiliki oleh Desa Adat (dahulu disebut Desa Pakraman). Secara operasional sesungguhnya LPD melakukan aktivitas-aktivitas yang sama dengan Bank, yakni menghimpun dana dari masyarakat dan sesudah itu menyalurkan kembali kepada masyarakat yang memerlukan bantuan berupa pinjaman.

Pulau Bali disamping tenar sebagai pulau seribu pura, juga disebut dengan pulau seribu lembaga keuangan mikro. Di Bali sudah berdiri 1.433 buah LPD yang tersebar di semua Desa Adat yang ada di Bali. Tujuan pendirian LPD tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 antara lain : Pertama, untuk menunjang pembangunan ekonomi masyarakat desa melewati tabungan yang terarah serta penyaluran modal yang efektif. Kedua, memberantas sistem ijon, gadai gelap dan lain-lain yang dapat disamakan dengan itu di daerah pedesaan, yang pada ketika itu masih banyak ada di daerah Bali. Ketiga, menciptakan pemerataan dan peluang kerja bagi warga pedesaan, baik yang dapat ditampung secara seketika di LPD, maupun yang dapat ditampung oleh usaha-usaha produktif masyarakat yang dibiayai oleh LPD. Keempat, menciptakan tenaga beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan pertukaran di desa (BKS-LPD, 2017). Pararem LPD tahun 2014

menyatakan sisi lain tujuan LPD adalah memperkuat ketahanan desa adat dalam melestarikan dan menumbuhkembangkan poin-poin luhur adat dan kebiasaan Bali yang dijiwai ajaran agama Hindu.

Wyasa Putra (2011) menguraikan LPD merupakan lembaga keuangan yang bersifat khusus, merupakan lembaga keuangan milik komunitas adat Bali, dengan kunci berhasil intermediasi LPD sebagai lembaga keuangan mikro betul-betul dipengaruhi oleh undang-undang-undang lokal yang betul-betul ditepati oleh masyarakat Bali. Salah satu di antaranya merupakan sanksi sosial bagi member masyarakat yang mempunyai kredit macet (*Non Performing Loan*) di LPD yang dipegang melalui *Awig-awig* dan *Perarem* Desa Adat. Keunikan LPD juga diperhatikan dari aspek pemupukan modalnya. Modal LPD berasal dari desa pekraman yang merupakan milik bersama warga desa pekraman. Perencanaan dan pertanggung-jawaban keuangan LPD dikerjakan melalui Paruman Desa Adat.

Institusi keuangan sejenis yang beroperasi di Bali dikala ini tergolong cukup banyak seperti Koperasi Simpan-Pinjam dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), serta bank lazim yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga ke pedesaan. Hal ini menjadi pesaing berat bagi LPD, tetapi LPD wajib mempertahankan eksistensinya secara lazim. Keberlanjutan maupun yang lebih dikenal dengan sebutan *sustainability* sudah jadi pembicaraan baik dalam wacana globalisasi ataupun dalam kaitannya dengan kinerja industri. Salimath & Raymond (2011) mengatakan bahwa sampai saat ini belum terdapat definisi yang baku tentang keberlanjutan usaha terlebih dalam konteks perusahaan, oleh sebab itu pengukuran

serta interpretasi terhadap konstruk tersebut sesuai pada tujuan dan kepentingan penelitian.

Dalam penelitian ini menggunakan Teori *Sustainability* yang dikemukakan oleh Elkington (1997), dimana teori ini menjelaskan bahwa untuk menjaga keberlangsungan hidupnya (*going concern*), perusahaan harus dapat berorientasi pada *Triple Bottom Line (TBL)* yang merekomendasikan agar perusahaan berorientasi pada 3P yaitu *Profit, People, Planet*. Kerangka kerja TBL memajukan tujuan keberlanjutan dalam praktik bisnis, di mana perusahaan melihat melampaui keuntungan untuk memasukkan masalah sosial dan lingkungan untuk mengukur biaya penuh dalam melakukan bisnis.

Teori TBL sesungguhnya telah terlaksana pada badan usaha LPD, di mana LPD ialah institusi keuangan komunitas berbasis pada kearifan lokal Bali, dalam menjalankan konsep keberlanjutan usaha TBL hal yang demikian merujuk pada ajaran lokal *Catur Purusa Artha*. *Catur Purusa Artha* ialah empat tujuan hidup umat Hindu, yang terdiri dari Dharma, Artha, Kama dan Moksa. Dalam Penelitian Pancadana dan Parwata (2013) yang berjudul “*Catur Purusa Artha* Sebagai Dasar Aktivitas Usaha Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pekraman Kikian” menunjukkan bahwa yang melandasi aktifitas usaha LPD ialah ajaran-ajaran agama Hindu yang bersumber pada kitab suci Weda.

Implementasi *Catur Purusa Artha* dalam penelitian ini berdasarkan pada Suhardana (2007) yang mengutip Sarasamuccaya Sloka 262 menyatakan bahwa pendayagunaan harta yakni hasil dari jerih payah seseorang atau perusahaan hendaknya dibagi tiga. Pembagian harta menjadi tiga komponen ditujukan untuk

melaksanakan *Catur Purusa Artha* yang yakni empat tujuan hidup umat Hindu. Pertama, Artha ditujukan untuk Artha yang berarti harta yang diperoleh hendaknya beberapa dipakai kembali untuk memperoleh harta di kemudian hari. Kedua, Artha ditujukan untuk memenuhi Kama yang berarti dinikmati untuk kehidupan pihak yang terlibat dalam usaha. Ketiga, Artha untuk kepentingan Dharma yang berarti dipakai untuk hal-hal kebajikan atau dana sosial terhadap lingkungan usaha.

Penerapan *Catur Purusa Artha* sebagaimana yang dimaksud dalam Sarasamuccaya Sloka 262 diimplementasikan dalam pembagian laba LPD yang tertuang dalam Bab XIII Tata Tempat Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 seputar Lembaga Perkreditan Desa, Pasal 23 membatasi pembagian keuntungan bersih LPD pada akhir tahun pembukuan diatur sebagai berikut: (1) Cadangan Modal 60%, (2) Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 20%, (3) Jasa Produksi 10%, (4) Dana Pemberdayaan 5% atau paling banyak Rp 300.000.000,-, (5) Dana Sosial 5%. Jatah laba bersih ini jika dikaitkan dengan konsep *Catur Purusa Artha*, maka Cadangan Modal sebesar 60% adalah adalah *Artha* untuk *Artha*. Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 20% serta Dana Sosial 5% adalah adalah *Artha* untuk *Dharma*. Sedangkan Jasa Produksi 10% adalah adalah *Artha* untuk *Kama*.

Konsep *Catur Purusa Artha* dalam pembagian laba perusahaan, benar-benar serasi dengan orientasi perusahaan yang mengarah kepada *Stakeholder Oriented* menuju *Sustainability Concept* dimana dalam jangka panjang, atau demi keberlangsungan hidupnya suatu perusaan (*Going Concern*), manajemen tak boleh cuma berorientasi pada kepentingan pemilik perusahaan (*Shareholder*) saja,

melainkan semestinya melihat kepentingan segala pihak yang berkaitan (*Stakeholder*). Dengan cara itu perusahaan dapat menjaga keberlangsungan hidupnya dalam jangka panjang. LPD dalam mengimplementasikan *Catur Purusa Artha* terus berupaya untuk meningkatkan daya kerja kemampulabaannya, kecuali dengan persentase konsisten lewat distribusi laba yang telah dikendalikan lewat Perda No. 3 Tahun 2017, banyak LPD yang dalam operasionalnya mengeluarkan tarif-tarif yang dimaksudkan untuk kesejahteraan pengurus, pengawas dan karyawan yang juga dapat digolongkan sebagai kama sebagaimana dimaksud dalam *Catur Purusa Artha*. LPD juga secara rutin mengalokasikan tarif-tarif operasional yang dibukukan sebagai tarif promosi untuk tujuan sosial dan pembangunan adat yang juga dapat digolongkan sebagai *dharma* sebagaimana dimaksud dalam *Catur Purusa Artha*.

Keberlanjutan usaha dari sebuah perusahaan tak cuma dilihat dari pembagian labanya saja, salah satu pendekatan yang dapat diaplikasikan perusahaan untuk menghadapi beragam tantangan dan peluang adalah pendekatan yang didasarkan *Resources Based View* (RBV). Lewat RBV perusahaan dapat membangun *competitive advantage* yang berkelanjutan melalui pemakaian sumber-sumber energi yang heterogen untuk keberlanjutan hidupnya. Berdasarkan pendapat Wernerfelt (1984) perusahaan wajib terus mengembangkan sumber energi yang dimiliki (*Resources Based View*) untuk dapat mempertahankan keunggulan berkompetisi secara berkesinambungan (*Sustainable Competitive Advantage*). Tidak ada perusahaan yang tetap dapat unggul tanpa penemuan kreatif.

Teori *Resource Based View of the Firm* dari Wernerfelt (1984) mengungkapkan bahwa daya kerja unggul perusahaan cuma mungkin dicapai dengan menguasai dan memakai aset-aset strategis yang vital bagi keunggulan berkompetisi dan kuat dampaknya bagi daya kerja keuangan dan keberlanjutan organisasi. Aset-aset strategis hal yang demikian bisa berupa aset berwujud maupun aset tidak berwujud. Konsep RBV ini sudah banyak diterima dalam bermacam disiplin ilmu dan literatur akuntansi, manajemen, ekonomi dan manajemen strategik (Belkaoui and Riahi, 2003). Barney (1991) mengungkapkan keunggulan komparatif yang berkelanjutan bagi tiap perusahaan tergantung pada sumber tenaga strategis yang bercirikan: bernilai (*valuable*), langka (*rare*), tidak bisa diikuti (*imperfectly imitable*) dan tidak tergantikan (*non substitutable*). Teori Barney hal yang demikian searah dengan temuan penelitian yang dijalankan oleh Isabel and Bailoa (2017) mengemukakan modal intelektual harus dianggap sebagai sumber daya strategis dan kemampuan untuk mengelolanya merupakan kunci keberhasilan. Berdasarkan penjelasan Isabel and Bailoa (2017) sangat jelas bahwa peran modal intelektual sebagai sumber tenaga strategis bagi suatu perusahaan akan menyokong keberlanjutan usahanya.

Perkembangan teknologi informasi yang sejalan dengan arus globalisasi bisnis sudah menghasilkan lingkungan *hiper*-kompetitif, di mana pimpinan perusahaan mesti mengembangkan taktik baru dan inovatif untuk tetap bertahan di dalam kompetisi. Pesatnya perkembangan institusi keuangan di Bali membuat LPD mesti terus berinovasi dan menggali semua sumber tenaga yang dimilikinya supaya dapat bertahan, tumbuh dan berkembang di tengah kompetisi yang kian ketat. LPD

yang kurang sehat dan tak sehat mesti disehatkan. Jika memungkinkan LPD yang beku operasi mesti dioperasikan kembali, sebab LPD adalah benteng desa adat secara finansial. Kunci keunggulan bersaing LPD dapat dipandang dari banyaknya LPD mempunyai sumber tenaga strategis, khususnya yang bersifat *immaterial* atau aset tak berwujud yang tak nampak dalam neraca LPD adalah modal intelektual. LPD mempunyai sebagian modal intelektual yang unggul adalah modal struktural, modal sosial dan modal reputasi.

Budaya dan struktur organisasi yang khas, yaitu salah satu sumber kekuatan strategis yang dimiliki oleh LPD di Bali. LPD sebagai lembaga keuangan milik desa adat, LPD memiliki kebiasaan organisasi berupa poin-poin inti dan kebiasaan yang menjadi perekat dalam internal LPD. Budaya organisasi yang berkembang di LPD yaitu modal struktural yang berkontribusi besar dalam meningkatkan kinerja LPD selama ini. Budaya lokal sudah diadopsi sebagai kebiasaan organisasi dalam meningkatkan kinerja keuangan pada lembaga keuangan mikro seperti LPD di Bali (Sukawati dan Astawa, 2018). Pada kebiasaan organisasi terdapat interaksi yang intens antara sumber kekuatan manusia lembaga keuangan mikro dengan konsumen, akan betul-betul membantu lembaga keuangan mikro dalam meningkatkan performanya keuangannya (Wolker, 2002).

Keunikan lain berlokasi pada struktur organisasi LPD yang melibatkan pimpinan desa adat dalam fungsi manajemen dan operasional LPD, terpenting di bidang pengawasan, menjadikan daya kerja keuangan LPD kian bagus. Pimpinan desa adat yang umum disebut Bendesa, dipilih oleh segala warga desa adat untuk mengerjakan roda organisasi desa adat, termasuk dalam hal mengawasi milik desa

adat seperti LPD. Bendesa dengan kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengawas LPD, yaitu dewan pengawas yang mewakili segala pemilik LPD karena LPD yaitu milik desa adat. Pelanggan atau nasabah LPD terdiri dari warga desa adat yang notabena juga yaitu pemilik LPD, hal tersebut menjadikan LPD tetap eksis berkelanjutan.

Bontis *et al.* (2000) menyatakan bahwa secara umum, penelitian-penelitian terdahulu mengidentifikasi tiga konstruk utama dari IC, merupakan: *Human Capital* (HC), *Structural Capital* (SC), dan *Customer Capital* (CC). Hashim, dkk (2015) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa konsep IC luas dan biasanya dibagi menjadi beberapa karakteristik, yaitu modal manusia, modal pelanggan, modal struktural, modal sosial, modal teknologi dan modal spiritual. Hal ini membuktikan bahwa modal intelektual dapat dipandang dari modal sosialnya. Interaksi LPD yang betul-betul menonjol dibandingkan dengan lembaga mikro lainnya ini dapat diwujudkan sebagai modal sosial. Modal sosial dapat didefinisikan sebagai serangkaian nilai dan adab informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kategori masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama diantara mereka. Modal sosial merupakan implementasi dan hasil dari orientasi perusahaan yang mengarah pada kepentingan stakeholder. Perusahaan dalam menjaga keberlangsungan hidupnya betul-betul berkepentingan untuk memelihara modal sosialnya.

Relasi sosial antara LPD dengan warga desa adat terjalin erat sehingga terwujud kepercayaan sosial dan jaringan sosial yang memungkinkan setiap individu, apakah pengurus, pengawas dan karyawan LPD, maupun masyarakat

sebagai nasabah LPD untuk bekerja sama. Jaringan sosial antara LPD dengan masyarakat sekitar telah memungkinkan LPD memperoleh kepercayaan sebagai daerah penampungan dana masyarakat dalam format tabungan dan deposito. Interaksi sosial yang baik pula menjadi dasar evaluasi penting bagi LPD dalam menyalurkan kembali dana yang dihimpun dalam format kredit terhadap masyarakat. Secara finansial layak dengan tata tertib yang ada, LPD menyediakan dana 5% dari labanya setiap tahun untuk dana sosial.

Nahapiet dan Ghoshal (1998) menyebut hubungan sosial antar individu dan jaringan keterkaitan diantaranya sebagai modal sosial (*social capital*). Coleman (2009) mengistilahkan modal sosial sebagai karakteristik dari hubungan antar individu dalam organisasi ataupun dengan individu di luar organisasi yang bisa berwujud kepercayaan sosial, norma dan jejaring sosial yang memungkinkan tiap individu untuk bekerja sama sehingga tercapai tujuan bersama.

Modal reputasi atau sumber energi reputasi ialah persepsi masyarakat kepada perusahaan atau sebagai determinasi persepsi loyalitas konsumen kepada produk perusahaan (Dollinger, 1999). Kriteria utama sumber energi reputasi ialah mutu produk, integritas, manajemen, kesehatan keuangan, pencapaian tujuan pasar dan nama baik. Berdasarkan pengertian hal yang demikian, sumberdaya reputasi lebih menunjuk pada harta tak berwujud yang dibangun melewati persepsi pelanggan atau nilai dari karyawan atau energi perusahaan.

Pada konteks LPD, modal reputasi terbangun terlebih akibat kekuatan kelembagaannya. Nama bagus LPD telah terbangun semenjak lama sesudah dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang cukup mengembirakan. Penelitian

Suarmanayasa (2016) membeberkan keberhasilan LPD dalam pembangunan pedesaan di Provinsi Bali. Modal reputasi LPD terwujud dari dua sisi kepentingan pelanggan. LPD amat diandalkan oleh masyarakat sebagai daerah menabung bagi mereka yang memiliki kelebihan dana. Salah satu keunggulan LPD sebagai penyimpan dana adalah terhadap nasabah tidak dipungut pajak pendapatan atas bunga simpanan yang diperoleh.

Modal reputasi LPD terwujud dari kemudahan evaluasi LPD dalam penyaluran kredit. Kemudahan ini pada kesudahannya menciptakan pelayanan kredit LPD menjadi lebih kencang, karena nasabah LPD berasal dari lingkungan desa pekraman setempat, maka evaluasi penyaluran kredit menjadi relatif lebih kencang karena karakter, kapasitas, dan kemampuan membayar kembali masyarakat calon nasabah telah diketahui oleh staf dan pengurus LPD sebelum mereka mengajukan kredit. Reputasi LPD juga terwujud dari keyakinan masyarakat, bahwa semua keuntungan yang diperoleh oleh LPD pada kesudahannya juga memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat, contohnya dalam bentuk tarif cuma-cuma pelaksanaan beberapa upacara adat.

Keberhasilan suatu perusahaan dalam memberikan manfaat terhadap semua pihak yang berkepentingan tak semata didapatkan dari pengendalian, pengelolaan, pengembangan sumberdaya strategis berupa modal intelektual yang dimiliki, akan melainkan oleh daya kerja keuangan yang secara berkelanjutan dapat ditempuh. Pernyataan ini sejalan dengan kajian Edelman (2002) bahwa sumber tenaga kurang sanggup menerangkan manfaat terhadap *stakeholder* secara parsial, melainkan wajib dimediasi oleh daya kerja keuangan.

Meningkatkan modal intelektual salah satu strategi untuk mencapai keberlanjutan usaha melewati TBL, dan penciptaan daya kerja keuangan perusahaan yang bagus. Nasabah akan memberikan skor yang lebih tinggi terhadap LPD yang mampu menampakkan daya kerja keuangan yang bagus, dan daya kerja keuangan bisa ditingkatkan melewati sumber energi berbasis intelektual (modal intelektual). Dengan demikian, daya kerja keuangan bisa bertindak sebagai variabel intervening dalam hubungan antara modal intelektual dan skor perusahaan. Penelitian Nuryaman (2015) memperkuat pernyataan hal yang demikian dengan penelitiannya yang menyimpulkan bahwa daya kerja keuangan yang diprosikan dengan *Return on Equity* (ROE) ternyata berfungsi sebagai variabel intervening pada hubungan modal intelektual dengan skor perusahaan ini menampakkan bahwa semakin besar modal Intelektual bisa meningkatkan daya kerja keuangan (ROE) perusahaan semakin tinggi, maka implikasinya ialah meningkatnya keberlanjutan usaha. Namun hasil dari penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Raharjo, dkk (2022) modal intelektual tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Kinerja keuangan LPD dalam pengevaluasian kesehatannya dinilai via pendekatan permodalan, aset, kemampuan dan likuiditas yang merujuk pada konsep CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earning, and Liquidity*). Konsep ini berasal dari regulasi perbankan internasional yang diketahui dengan sebutan BIS (*Bank for International Settlements*). Penelitian empirik terkait kinerja keuangan dan kaitannya kepada keberlanjutan usaha, dilakukan oleh Arsyad (2005) yang berjudul "*An Assessment of Microfinance Institution Performance, The Importance*

of *Institutional Environment*”, menemukan bahwa kinerja keuangan lembaga keuangan mikro berupa LPD di Kabupaten Gianyar Bali yang dinilai dengan indikator keuangan (*portofolio quality, leverage, capital adequacy ratio, productivity, efficiency, profitability, and financial viability/CAEL*) cukup bagus dan dapat mempertahankan keberlanjutannya, serta disupport oleh lingkungan institusional, bagus yang bersifat formal maupun informal.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ulum (2008) dan Tan *et al.* (2007) menyatakan bahwa modal intelektual berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja perusahaan. Namun hasil dari penelitian tersebut berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Santosa, S. (2012) dimana modal intelektual tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Kabupaten Badung merupakan salah satu kabupaten yang terkena dampak besar dari Covid-19, karena banyaknya sektor pariwisata serta banyaknya warga desa yang bekerja sektor pariwisata. Hal ini tentu akan berdampak pada keuangan warga desa sehingga secara tidak langsung dapat menurunkan kinerja keuangan dan berdampak pada keberlanjutan LPD se Kabupaten Badung. Berdasarkan hasil observasi untuk mengetahui tingkat kesehatan LPD se-Kabupaten Badung pada Tahun 2019-2021 disajikan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1
Kesehatan LPD di Kabupaten Badung Tahun 2019-2021

No	Tahun	Sehat		Cukup Sehat		Kurang Sehat		Tidak Sehat		Tidak Beroperasi		Jumlah
		buah	%	buah	%	buah	%	buah	%	buah	%	
1	2019	78	63,93	21	17,21	12	9,84	4	3,28	7	5,74	122
2	2020	55	45,08	25	20,49	19	15,57	16	13,11	7	5,74	122
3	2021	39	31,97	28	22,95	27	22,13	22	18,03	6	4,92	122

Sumber: *LPLPD Kab.Badung, 2022*

Tabel 1.1 menampakkan bahwa LPD yang sehat mengalami penurunan tiap tahunnya. Begitu juga LPD yang kurang sehat dan tidak sehat mengalami peningkatan yang signifikan tiap tahunnya. Situasi LPD yang sehat mengalami hal sebaliknya, Jumlah LPD yang sehat mengalami penurunan 50% dari tahun 2019-2021 dari tahun 2019 terdapat 78 LPD yang sehat, tahun 2021 dinyatakan hanya 39 LPD yang masih sehat. Penurunan dan peningkatan tingkat kesehatan tersebut menampakkan indikasi, bahwa kesinambungan operasional LPD memperoleh tantangan di tengah misinya yang demikian itu mulia. Pengurus, pengawas dan semua pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan LPD patut memikirkan dan mencari jalan keluar untuk menjaga kesinambungan LPD. Keberlangsungan hidup perusahaan cuma akan terjadi apabila perusahaan menyimpan kepedulian terhadap pertumbuhan ekonomi, kepedulian terhadap pengembangan lingkungan dan kepedulian terhadap pengembangan sosial.

Penelitian ini ingin mengkonfirmasi bagaimana pengaruh modal struktural, modal sosial, dan modal reputasi terhadap kinerja keuangan dan keberlanjutan usaha karena melihat fenomena lapangan yang terjadi dari tahun 2019 hingga tahun 2021 pada LPD se-Kabupaten Badung, LPD yang dinyatakan sehat terus mengalami penurunan. Untuk itu berdasarkan hal-hal yang telah di lakukan penelitian sebelumnya sebagai pembanding dan beberapa hasil penelitian lain sebagai pendukung, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh modal struktural, modal sosial, dan modal reputasi terhadap kinerja keuangan dan keberlanjutan usaha (Studi pada LPD se-Kabupaten Badung).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- 1) Apakah modal struktural mempengaruhi kinerja keuangan pada LPD di Kabupaten Badung?
- 2) Apakah modal sosial mempengaruhi kinerja keuangan pada LPD di Kabupaten Badung?
- 3) Apakah modal reputasi mempengaruhi kinerja keuangan pada LPD di Kabupaten Badung?
- 4) Apakah modal struktural mempengaruhi keberlanjutan usaha LPD di Kabupaten Badung?
- 5) Apakah modal sosial mempengaruhi keberlanjutan usaha LPD di Kabupaten Badung?
- 6) Apakah modal reputasi mempengaruhi keberlanjutan usaha LPD di Kabupaten Badung?
- 7) Apakah kinerja keuangan mempengaruhi keberlanjutan usaha LPD di Kabupaten Badung?

1.3. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan permasalahan, maka penelitian ini ditujukan untuk menganalisis secara empiris, menguji dan menjelaskan:

- 1) Pengaruh modal struktural terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kabupaten Badung

- 2) Pengaruh modal sosial terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kabupaten Badung
- 3) Pengaruh modal reputasi terhadap kinerja keuangan pada LPD di Kabupaten Badung
- 4) Pengaruh modal struktural terhadap keberlanjutan usaha LPD di Kabupaten Badung
- 5) Pengaruh modal sosial terhadap keberlanjutan usaha LPD di Kabupaten Badung
- 6) Pengaruh modal reputasi terhadap keberlanjutan usaha LPD di Kabupaten Badung
- 7) Pengaruh kinerja keuangan terhadap keberlanjutan usaha LPD di Kabupaten Badung

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

- 1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan modal struktural, modal sosial, modal reputasi terhadap keberlanjutan usaha dan kinerja keuangan.

- 2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat praktis dalam hubungan modal struktural, modal sosial, modal reputasi terhadap

keberlanjutan usaha dan kinerja keuangan dalam perusahaan, sehingga nantinya diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan strategi perusahaan dalam hal pengembangan perusahaan secara efektif di waktu yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Utama (*Grand Theory*)

Grand Theory yang digunakan untuk penelitian ini adalah *Resource-Based View* (RBV) dan Stakeholder. Teori tersebut melandasi variabel penelitian ini, yaitu modal struktural, modal sosial, modal reputasi, kinerja keuangan dan keberlanjutan usaha. Teori tersebut dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1.1 Teori *Resource-Based View* (RBV)

Perkembangan atau evolusi dari teori *RBV* diawali oleh pendapat Penrose (1959) yang memandang perusahaan merupakan suatu organisasi yang mengelola berbagai sumberdaya yang bersifat produktif. Berbagai sumberdaya yang dikelola ada yang bersifat material dan ada pula yang bersifat tidak material, ada yang berwujud, ada pula yang tidak berwujud. Penrose (1959) juga mengemukakan bahwa sumberdaya material dan sumber daya manusia yang sama bisa dikombinasikan dengan cara yang berbeda antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain, tergantung pada ide-ide yang mendasari penggunaannya.

Berdasarkan definisi yang dikemukakan oleh Penrose (1959) tentang perusahaan, kemudian Wernerfelt (1984) mengemukakan pandangan yang berbasis pada sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan (*Resources-Based View*) saat perusahaan mengembangkan strategi usaha yang dapat menciptakan

keunggulan bersaing secara berkesinambungan (*sustainable competitive advantage*).

Model keunggulan bersaing pertama kali dikemukakan oleh Michael M. Porter tahun 1980. Porter menjelaskan dua isu strategis yang berhubungan sangat erat dengan upaya-upaya perusahaan dalam memperoleh laba. Pertama, perusahaan harus bisa memilih jenis industri yang akan ditekuninya. Kedua, perusahaan harus bisa memilih posisi dan menentukan strategi bersaing (fokus, strategi diferensiasi, atau strategi kepemimpinan harga) yang tepat yang kemudian membuatnya mampu mengungguli pesaing pada jenis industri yang sama.

Seiring dengan semakin meluasnya penerimaan pendapat Penrose (1959) dan Wernerfelt (1984), maka riset-riset mengenai perilaku sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan semakin intensif dilakukan dan mengusulkan untuk memperhatikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan saat akan mengembangkan strategi, karena pada hakekatnya perusahaan adalah merupakan sekumpulan sumberdaya, baik yang berwujud maupun tak berwujud.

Barney (1991) menyatakan bahwa sumberdaya strategis merupakan sumber daya yang mampu menciptakan keunggulan kompetitif berkelanjutan dan sumberdaya tersebut memiliki atribut bernilai (*valuable*), jarang atau sulit diperoleh (*rarely*), sulit atau tidak bisa ditiru (*inimitable*), dan tak tergantikan (*non-substitutable*). Keempat atribut itu selanjutnya dikenal sebagai VRIN dan dianggap sebagai syarat penting agar sekumpulan sumberdaya dapat dijadikan landasan untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan.

Curado (2006) berpendapat bahwa teori *RBV* dengan *VRIN*-nya adalah suatu pemikiran yang menekankan agar strategi bersaing dilakukan dengan mengedepankan kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) yang keduanya berasal dari dalam perusahaan. Hal tersebut kemudian menjadi pembeda utama dari model keunggulan bersaing yang dikemukakan oleh Porter (1980) yang lebih mengedepankan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang ada pada lingkungan eksternal perusahaan.

Fahy (2000) menjelaskan bahwa banyak riset dalam sepuluh tahun terakhir yang berusaha mengkombinasikan dan mengintegrasikan dua sudut pandang (internal dan eksternal) dalam menganalisis dan mengembangkan strategi usaha. Hal tersebut tidak lepas dari anggapan bahwa keunggulan kompetitif perusahaan membutuhkan adanya pamadanan (*matching*) antara kapabilitas internal organisasi dengan perubahan kondisi eksternal.

Pendekatan *RBV* tentang keunggulan kompetitif yang menyatakan bahwa sumberdaya internal lebih penting dibandingkan dengan faktor eksternal dalam mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif ditolak oleh penelitian lain. Fahy (2000) meneliti pengaruh lingkungan internal dan eksternal pada industri perbankan di Indonesia. Hasilnya justru lingkungan eksternal yang lebih berpengaruh terhadap kinerja perbankan. Barney (1991) menyatakan bahwa kinerja organisasi pada dasarnya ditentukan oleh sumberdaya internal. Agar sumberdaya internal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan bernilai strategis harus memiliki sifat:

- 1) Sumber daya langka, adalah sumberdaya yang tidak dimiliki perusahaan pesaing. Jika banyak perusahaan memiliki sumber daya yang sama, maka perusahaan tersebut cenderung mengimplementasikan strategi yang mirip, maka tidak akan memberikan keunggulan kompetitif.
- 2) Sumber daya yang sama sulit untuk ditiru, jika perusahaan tidak dengan mudah mendapatkan sumberdaya, maka sumber daya akan mengarah kepada keunggulan kompetitif.
- 3) Tidak mudah digantikan, apabila tidak ada produk pengganti yang memungkinkan, maka perusahaan akan mampu mempertahankan keunggulan kompetitifnya.

Faktor-faktor spesifik perusahaan lebih penting dibandingkan dengan lingkungan atau karakteristik struktur industri untuk menghasilkan kinerja superior. Barney (1991) menjelaskan bahwa perusahaan memiliki sumberdaya strategis yang heterogen dan sulit untuk ditiru. *“The RBV identifies four key resource attributes needed for potential sustainable competitive advantage: value, rarity, imperfect imitability, and non-substituability.”* Barney menjelaskan bahwa teori *RBV* saat ini merupakan teori yang sangat membantu dalam perumusan strategi dan telah mendapatkan sejumlah perhatian yang signifikan dalam literatur manajemen strategik. Teori *RBV* menjadi sangat penting bagi penelitian dengan objek strategi untuk mengkaji cara perusahaan untuk mengembangkan sumberdaya strategis sebagai sebuah keunggulan bersaing. Tingkat keberhasilan sebuah organisasi dalam meningkatkan kinerja, sangat dipengaruhi oleh tingkat keunggulan kompetitif yang

dimilikinya dan kemampuan berkelanjutan untuk mempertahankan keunggulan tersebut (David & Stoica, 2015).

Dehui, *et al* (2014) melakukan pengembangan terhadap model RBV yang dinyatakan sebagai *Extended RBV (ERBV)*. *ERBV* dinyatakan atas dasar sumber daya strategis dan pengetahuan tidak hanya dibawa dari batas-batas perusahaan saja. Perusahaan harus menyatukan kemampuan dan sumber daya intern dan ekstern organisasi untuk meningkatkan kemampuan organisasi dan keunggulan bersaing berkelanjutan. Hal lain yang dipaparkan bahwa sumberdaya *intern* organisasi meliputi dukungan manajemen puncak dan teknologi informasi. Sementara sumberdaya ekstern organisasi meliputi pemasok dan integrasi pelanggan.

2.1.1.2 Teori Sinyal

Teori sinyal atau *signaling theory* yaitu suatu perbuatan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi pertanda investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Teori ini memberikan penjelasan mengenai alasan perusahaan memiliki dorongan untuk mempersembahkan atau memberikan berita terkait laporan keuangan perusahaan untuk pihak eksternal. Dorongan untuk mempersembahkan atau memberikan berita terkait laporan keuangan untuk pihak eksternal dilandasi pada terdapatnya asimetri berita antar manajemen perusahaan dan pihak eksternal (Bergh *et al.*, 2014). Manajemen perusahaan memiliki lebih banyak berita terkait operasional perusahaan dan prospek masa depan perusahaan dibandingkan dengan pihak eksternal seperti investor, kreditor, underwriter dan pengguna berita lainnya. Oleh karena itu, untuk

menanggapi masalah hal yang demikian dan mengurangi asimetri berita yang terjadi karenanya hal yang bisa dilakukan yaitu dengan memberikan sinyal terhadap pihak luar yang dilakukan melalui laporan keuangan perusahaan yang didalamnya terdapat berita keuangan perusahaan yang kredibel atau bisa diandalkan dan akan memberikan kepastian mengenai prospek keberlanjutan perusahaan kedepannya.

Teori sinyal didasarkan pada asumsi bahwa isu yang diterima oleh masing-masing pihak tak sama. Dengan kata lain, teori sinyal terkait dengan asimetri isu. Teori sinyal menampakkan adanya asimetri isu antara manajemen perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan isu. Untuk itu, manajer perlu memberikan isu bagi pihak-pihak yang berkepentingan melalui penerbitan laporan keuangan. Teori sinyal mengemukakan perihal bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa isu mengenai apa yang sudah dikerjakan oleh manajemen untuk merealisasikan harapan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau isu lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih bagus ketimbang perusahaan lain diaplikasikan para manajer perusahaan yang mempunyai isu lebih bagus mengenai perusahaannya akan terdorong untuk memberi tahu isu tersebut kepada calon investor dimana hal tersebut bertujuan agar perusahaan dapat meningkatkan skor perusahaan melalui suatu pelaporan dengan mengirimkan sinyal melalui laporan keuangan (Scott & R, 2012).

Isyarat atau signal yaitu suatu perbuatan yang diambil oleh manajemen perusahaan yang memberi pertanda bagi investor dalam bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Layak dengan pernyataan hal yang demikian,

perusahaan dengan prospek masa depan yang menguntungkan akan mencoba untuk menghindari penjualan saham perusahaan tapi mengusahakan pendapatan modal baru melalui metode lain seperti pemakaian hutang melebihi target struktur modal normal. Sebaliknya, perusahaan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan cenderung menjual saham perusahaannya. Dengan kata lain pengumuman emisi saham oleh suatu perusahaan yaitu suatu isyarat atau sinyal yang menandakan bahwa manajemen perusahaan memandang prospek perusahaan hal yang demikian kelam dan jikalau suatu perusahaan menawarkan penjualan saham baru dengan frekuensi yang lebih kerap dari umumnya karenanya harga saham perusahaan hal yang demikian akan menurun, hal ini diakibatkan karena dengan menerbitkan saham baru karenanya memberikan isyarat negatif yang kemudian bisa menekan harga saham (Przepiorka & Berger, 2017). Dengan kata lain kenaikan harga saham atau tingginya harga saham suatu perusahaan yaitu indikasi bahwa perusahaan hal yang demikian memiliki nilai perusahaan (*firm value*) yang tinggi. Oleh karena itu, nilai perusahaan bisa memberikan kesejahteraan bagi pemegang saham seiring dengan meningkatnya harga saham (Nguyen, 2018). Teori sinyal terkait dengan nilai perusahaan, jikalau perusahaan gagal atau tak bisa mempersembahkan signal dengan bagus mengenai nilai perusahaan karenanya nilai perusahaan akan mengalami ketidaksesuaian terhadap kedudukannya, dengan artian nilai perusahaan bisa berada diatas atau dibawah nilai sesungguhnya.

2.1.1.3 Teori Stakeholder

Teori *stakeholder* muncul sebagai perbaikan atas pendekatan lama sebuah perusahaan yang dalam melaksanakan aktivitasnya hanya berorientasi pada

pemegang saham saja. Pendekatan lama sebuah perusahaan menekankan pada bentuk hubungan perusahaan dengan pihak luar hanya bersifat transaksional, jangka pendek dan bersifat sementara.

Pendekatan ini kemudian memunculkan banyak konflik bagi perusahaan dikarenakan perusahaan secara tidak langsung memisahkan diri dengan para *stakeholder*, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan (Ang Swat Lin, 2015). Pendekatan baru dalam operasional perusahaan menitikberatkan pada kolaborasi perusahaan dengan *stakeholder* baik dari internal maupun dari eksternal yang disadari memiliki kepentingan dan peran masing-masing bagi kemajuan perusahaan. Hubungan dengan para pihak internal dijalin dengan dasar kebermanfaatannya atau kepentingan bersama. Sementara hubungan dengan pihak luar dibangun dengan pola kemitraan strategis. Teori *stakeholder* membuat perusahaan tidak lagi mengeksklusifkan dirinya dari para *stakeholder*, sehingga dengan pola hubungan yang demikian, arah dan tujuan perusahaan bukan lagi berorientasi pada menghimpun kekayaan sebesar-besarnya, namun lebih kepada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*) (Lesmana & Tarigan, 2014).

Stakeholder Theory adalah teori yang digunakan untuk mengungkap kebutuhan informasi bagi para pengguna laporan keuangan berdasarkan perspektif kepentingan para pengguna informasi. Pemenuhan kepentingan para pengguna informasi dilandasi oleh berbagai aspek. Penggunaan *Stakeholder Theory* dilandaskan pada pertimbangan bahwa individu dan kelompok menurut teori ini merupakan bagian yang mampu mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi dengan

prilaku-prilaku tertentu. Individu dan kelompok akan berperilaku yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. (Anik, 2013). Teori *stakeholder* merupakan suatu teori yang menjelaskan bahwa keberlangsungan hidup suatu perusahaan dalam jangka panjangnya akan sangat ketergantungan dari peran seluruh *stakeholder*, baik internal seperti karyawan maupun eksternal seperti pemerintah, supplier, kreditor, masyarakat.

Danai (2012) menyatakan bahwa masa depan kesinambungan bisnis bergantung pada penerapan kebijaksanaan dan misi yang mencerminkan sikap moral yang baru, yaitu sikap bertanggungjawab tidak hanya terhadap para pekerja saja, melainkan juga kemanusiaan beserta lingkungan alam luas dan lain sebagainya dengan berbagai latarbelakang kepentingannya. Penjelasan Danai (2012) serta Lesmana & Tarigan (2014) sangat selaras dengan konsep *Tri Hita Karana* di Bali. Ramantha (2020) menjelaskan bahwa ekonomi dunia, kini sedang menuju kearah deglobalisasi. Saat zaman globalisasi, kebijakan ekonomi memang lebih berpihak pada pemodal (*share holder*), atau negara-negara yang ekonominya maju. Kini di era deglobalisasi, ekonomi lebih berpihak pada semua pemangku kepentingan (*stakeholder*). *Tri Hita Karena* dengan teksnya yang memang bersifat sangat universal, dengan demikian, sangat relevan dalam konteks ekonomi global yang menuju ke era ekonomi baru yang berorientasi pada prinsip-prinsip keberlanjutan (*suatainabelity economic/going concern*).

Pihak yang meyakini teori *stakeholder* berpendapat bahwa semua pihak yang berkepentingan terhadap sebuah entitas perusahaan memiliki prioritas yang sama, yang dengan demikian harus memperoleh manfaat yang proporsional sesuai

dengan perannya. Jensen (2010) menyatakan bahwa dengan memperhatikan kepentingan *stakeholder* perusahaan dapat meningkatkan nilai jangka panjang perusahaan tersebut.

Teori *stakeholder* sangat selaras dengan operasional LPD karena sebagai lembaga keuangan komunitas, LPD memiliki banyak fungsi, baik yang menyangkut kepentingan para pemiliknya, masyarakat luas di Bali, maupun lingkungan dan bahkan budaya Bali. Keberadaan LPD sangat sarat dengan implementasi budaya, hukum adat, dan filosofi-filosofi lokal kehidupan masyarakat Bali. LPD adalah lembaga keuangan yang bersifat khusus, yakni lembaga keuangan milik komunitas adat Bali (Putra, 2011). Berperan sebagai lembaga keuangan komunitas, keberadaan LPD sangat membantu dalam melakukan intermediasi keuangan masyarakat adat, melestarikan adat dan budaya Bali yang semakin berkembang secara dinamis. LPD juga berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan di desa adat, baik langsung maupun tidak langsung. Secara langsung LPD terus menambah dan melatih tenaga-tenaga setempat baik sebagai pengurus maupun sebagai karyawan dan secara tidak langsung, LPD dalam membiayai usaha-usaha produktif yang ada di pedesaan pasti mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.

2.1.2 Keberlanjutan Usaha

Keberlanjutan atau yang lebih dikenal dengan istilah *sustainability* telah menjadi perbincangan baik dalam wacana globalisasi maupun dalam kaitannya dengan kinerja perusahaan. Keberlanjutan merupakan isu kontroversial dan ada

banyak definisi mengenai apa yang dimaksud dengan istilah tersebut. Sampai saat ini belum ada definisi yang baku mengenai keberlanjutan terutama dalam konteks perusahaan. Pengukuran dan interpretasi terhadap konstruk tersebut tergantung pada tujuan dan kepentingan para peneliti (Supriyadi, 2013). Sepaham dengan yang dikatakan oleh Salimath & Jones III (2011) : ”*There is no concensus on a unified definition of sustainability. Futhermore, the measurement and interpretation of this construct appears to be idiosyncratic to specific aims or research interest*”.

Definisi *keberlanjutan* dalam konteks perusahaan sebagai berikut: “*A sustainable corporation is one that creates profit for its stakeholder while protecting the environment and improving the lives of those with whom it interacts*” (Cambra- Fierro & Benitez, 2011). Berdasarkan definisi tersebut, tersirat bahwa keberlanjutan usaha *berhubungan* dengan kemampuan perusahaan menciptakan laba, kemampuan perusahaan melindungi lingkungan dan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan kehidupan sosial. Keberlanjutan usaha *juga* mempertimbangkan untuk menyertakan kriteria tambahan dalam mengevaluasi kinerja bisnis, yang telah dikenal sebagai “*Triple Bottom Line*”. Kata *triple bottom line* mengacu pada integrasi dari kinerja *ecological* dan kinerja sosial dalam kaitannya dengan kinerja keuangan. *Triple bottom line* juga seringkali dirujuk sebagai tiga pilar dari permintaan sosial, lingkungan dan ekonomi. Kombinasi dari *poeples*, *planet* dan *profit* secara efektif dan sederhana menjelaskan tujuan dari *sustainability* (Salimath & Jones III: 2011).

Keberlanjutan usaha dapat diinterpretasikan sebagai mengadopsi strategi bisnis dan kegiatan yang memenuhi kebutuhan perusahaan dan *stakeholder*

sekaligus melindungi, mempertahankan dan meningkatkan sumber daya manusia dan alam yang akan dibutuhkan dimasa yang akan datang (Searcy, 2011). Teori *stakeholder* tersebut sejalan konsep *TBL* (3P) yang dikembangkan oleh Elkington (1997) yang menguraikan bahwa tidak hanya *profit* (*single P*) yang harus dikejar oleh perusahaan, tetapi tiga hal, yaitu *economic prosperity*, *environmental quality* dan *social justice*. 3P ini kemudian banyak diartikan sebagai *Profit*, *People* dan *Planet*. Teori *TBL Elkington* (1994) menjelaskan bahwa untuk menjaga keberlangsungan usahanya, sebuah bisnis tidak hanya mengejar laba, tetapi juga sosial dan lingkungan. Amos, *et al.* (2016) juga menjelaskan: *Sustainability and Triple Bottom Line, as tools to examine, appraise or measure the effects of business activities on the economy, social equity, and environment*.

Menurut Smith & Sharicz (2011), definisi keberlanjutan usaha yang dikaitkan dengan perpesktif *TBL* sebagai berikut: “*TBL sustainability as the result of the activities of an organization, voluntary or governed by law, that demonstrate the ability of an organization to maintain viability its business operation (including financial viability as appropriate) whilst not negatively impacting any social or ecological systems*”. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa keberlanjutan usaha *TBL* merupakan hasil dari kegiatan organisasi, sukarela maupun diatur oleh hukum, yang menunjukkan kemampuan organisasi untuk mempertahankan kelangsungan operasi bisnis (termasuk kelangsungan keuangan yang sesuai) yang tidak berdampak negatif terhadap sistem sosial dan ekologi. Kinerja yang baik dalam dimensi finansial menghasilkan kinerja masa depan yang baik pada dimensi lingkungan dan sebaliknya (Aras & Crowther, 2011), sehingga tidak ada dikotomi

antara kinerja lingkungan dan kinerja finansial dan kedua konsep menggabung dalam satu tujuan. Penelitian Nguyen (2016) yang berjudul *The effect of capital structure and legal status on financial sustainability of MFIs in developing countries*, menguji pengaruh struktur modal terhadap *financial sustainability* pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) di negara-negara berkembang. Hasil penelitian menemukan bahwa *financial sustainability* LKM di negara-negara berkembang secara negatif dan signifikan dipengaruhi oleh struktur modal yang merupakan salah satu indikator kinerja keuangan.

2.1.2.1 Pengukuran Keberlanjutan Usaha

Mengacu pada Aras & Crowther (2011) tidak ada definisi yang khusus mengenai keberlanjutan usahadan setiap organisasi perlu untuk menemukan definisi sendiri sesuai tujuan dan maksudnya. Salimath & Jones III (2011) mengungkapkan : *"There is no concensus on a unified definition of sustainability. Futhermore, the measurement and interpretation of this construct appears to be idiosyncratic to specific aims or research interest"*. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sampai saat ini belum ada definisi yang baku mengenai keberlanjutan usaha terutama dalam konteks perusahaan, karena itu pengukuran dan interpretasi terhadap konstruk tersebut tergantung pada tujuan dan kepentingan penelitian.

Pengukuran keberlanjutan usaha pada perusahaan skala global telah banyak dilakukan. Contoh nya indeks sustainabilitas Dow Jones (*Dow jones sustainability index*) yang menggunakan indikator-indikator sustainabilitas berdasarkan pengungkapan pada laporan keuangan yang dipublikasikan. *American Petroleum*

Institute (API) dan *International Petroleum Industry Environmental Conservation Association* (IPIECA) juga mengukur keberlanjutan usaha perusahaan perminyakan secara kuantitatif dengan indikator khusus pada perusahaan minyak yang telah ditetapkan dan terstandar.

Pengukuran keberlanjutan usaha secara kuantitatif, masih mengandung perdebatan. Tujuan pengukuran keberlanjutan usahajuga sangat beragam tergantung pada kepentingannya. Faupel & Schwach (2011) menyatakan “*The objective of a sustainability measure is to asses the contribution of an entity (e.g., company) to sustainability comprising all three dimension: environmental, social and economic*” (Tujuan pengukuran keberlanjutan usaha adalah untuk menilai kontribusi sebuah entitas (yakni perusahaan) terhadap sustainabilitas yang melibatkan tiga dimensi yakni lingkungan, sosial dan ekonomi). Salah satu pendekatan yang paling sering digunakan untuk mengukur *corporate sustainability* adalah pendekatan *TBL* (Supriyadi, 2013).

2.1.2.2 Konsep Implementasi Budaya *Catur Purusha Artha* sebagai Pengukuran Keberlanjutan Usaha

Definisi yang baku mengenai keberlanjutan usaha sampai saat ini belum ditemukan terutama dalam konteks perusahaan, oleh karena itu pengukuran dan interpretasi terhadap konstruk tersebut tergantung pada tujuan dan kepentingan dari penelitian. Penelitian terdahulu sebagian besar mengukur konstruk keberlanjutan usaha dengan menggunakan dimensi *triple bottom line* yang terdiri atas dimensi finansial, demografi dan lingkungan.

Elkington (1997) juga menjelaskan bahwa perusahaan harus menunjukkan tanggung jawabnya yang berimbang kepada 3P yaitu *Profit*, *People* dan *Planet* yang menyatakan: *Triple Bottom Line framework advances the goal of sustainability in business practices, in which companies look beyond profits to include social and environmental issues to measure the full cost of doing business.* Artinya, sebuah bisnis harus berorientasi tidak hanya pada laba semata, tetapi juga harus memperhitungkan seluruh komponen biaya kemanusiaan dan lingkungan dalam menjalankan usahanya.

Profit yang secara konvensional menjadi tujuan perusahaan, memang harus terus diupayakan dalam rangka mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Ekspansi usaha dan peningkatan kapasitas perusahaan sangat tergantung dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. *People*, merupakan lingkungan masyarakat yang ada di dalam maupun di luar perusahaan. Suatu perusahaan akan bisa menjalankan bisnisnya didukung oleh sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan maupun masyarakat sekitarnya. *Planet*, merujuk pada lingkungan fisik yang berhubungan dengan perusahaan. Hubungan perusahaan dan lingkungannya merupakan hubungan sebab-akibat. Perusahaan bisa terjaga keberlangsungan hidupnya, karena dia telah mengeksploitasi lingkungan sedangkan apabila lingkungan tidak terjaga dengan baik, maka perusahaan akan terancam keberlangsungan hidupnya.

LPD yang merupakan lembaga keuangan komunitas yang berbasis pada kearifan lokal Bali, melaksanakan konsep keberlanjutan usahanya atau *triple bottom line* mengacu pada ajaran lokal *Catur Purusa Artha* kaitannya dengan

Saraccamuscaya Sloka 262 dengan mengalokasikan laba tahunannya atau membagikan dividennya berdasarkan Bab XIII Pasal 3 Perda Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 yang memang sangat selaras dengan teori *TBL*.

Penggunaan implementasi filosofi *Catur Purusa Artha* sebagai pengajawantahan dari keberlanjutan usaha melalui *triple bottom line* dalam membagikan dividen LPD. Penelitian yang dilakukan Pancadana (2012) yang berjudul “*Catur Purusa Artha* Sebagai Dasar Kegiatan Usaha Lembaga Perkreditan Desa di Desa Pekraman Kikian” menemukan bahwa yang melandasi kegiatan usaha LPD adalah hukum agama Hindu atau ajaran-ajaran agama Hindu yang bersumber pada kitab suci Weda. *Catur Purusa Artha* yang terdiri atas unsur *Dharma*, *Artha*, *Kama* dan *Moksa* merupakan dasar kegiatan usaha, dimana dharma atau kebaikan harus melandasi semua kegiatan LPD, selanjutnya mencari keuntungan atau *artha*. Keuntungan yang diperoleh baru akan bisa memenuhi keinginan atau *kama* dari masyarakat. Kesemua itu bila terlaksana akan menimbulkan kebahagiaan yang disebut *moksa*.

Lopez (2006) menjelaskan keputusan keuangan yang terdiri dari keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen adalah merupakan strategi keuangan yang memberi jalan agar perusahaan dapat meningkatkan dan mempertahankan daya saingnya. Sementara Levy dan Sarnet (1990) menjelaskan bahwa kebijakan dividen pada hakekatnya adalah menentukan porsi keuntungan yang akan dibagikan kepada para pemegang saham dan yang akan ditahan sebagai bagian dari laba ditahan.

Friady (2006) menjelaskan kebijakan dividen atau pembagian laba merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh oleh sebuah perusahaan pada akhir tahun akan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Pengertian kebijakan dividen menurut Atmaja (2001) adalah bahwa manajemen mempunyai dua alternatif perlakuan terhadap penghasilan bersih sesudah pajak perusahaan, yaitu dibagi kepada para pemegang saham perusahaan dalam bentuk dividen atau dipergunakan sebagai laba ditahan. Pada umumnya laba setelah pajak sebagian dibagi dalam bentuk dividen dan sebagian lagi diinvestasikan kembali. Artinya manajemen harus membuat keputusan tentang besarnya laba setelah pajak yang dibagikan sebagai dividen. Pembuatan keputusan tentang dividen ini disebut kebijakan dividen.

Husnan, dkk (1996: p.381) menyatakan kebijakan dividen menyangkut masalah penggunaan laba yang menjadi hak para pemegang saham atau pemilik perusahaan, dan laba tersebut bisa dibagi sebagai deviden atau laba yang ditahan untuk diinvestasikan kembali. Besarnya dividen yang dibayarkan akan meningkatkan nilai perusahaan atau harga saham. Namun semakin besar dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham akan memperkecil sisa dana yang dapat dipergunakan untuk mengembangkan perusahaan sebagai reinvestasi, karena laba ditahan tersebut merupakan sumber dana intern yang dapat digunakan untuk membelanjai perusahaan. Semakin rendah laba ditahan akibatnya akan memperkecil kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba yang pada akhirnya juga memperkecil pertumbuhan dividen. Kebijakan dividen menimbulkan dua

akibat yang bertentangan, oleh karena itu penentuan besarnya dividen yang dibagikan kepada pemegang saham menjadi sangat penting dan merupakan tugas manajemen untuk mengambil kebijakan dividen yang optimal (Basyori, 2018).

Suhardana (2007) mengutip Sarasamuccaya Sloka 262 yang menyebutkan pendayagunaan harta sebagai hasil dari jerih payah seseorang atau perusahaan hendaknya dibagi tiga. Pembagian harta menjadi tiga bagian ini ditujukan untuk menjalankan *Catur Purusa Artha* yang merupakan empat tujuan hidup umat Hindu. *Pertama, Artha* ditujukan untuk *Artha* yang berarti bahwa harta yang diperoleh hendaknya sebagian digunakan kembali untuk memperoleh harta di kemudian hari. *Kedua, Artha* ditujukan untuk memenuhi *Kama* yang berarti dinikmati untuk kehidupan pihak yang terlibat dalam usaha. *Ketiga, Artha* untuk kepentingan *Dharma* yang berarti digunakan untuk hal-hal kebajikan atau dana sosial kepada lingkungan usaha. Konsep *Artha* untuk *Dharma* atau umum disebut *Dana Punia* ini yang kemudian baru tahun 1990 an oleh teori manajemen modern disebut sebagai *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Mencapai moksa yang sebagai tujuan hidup yang tertinggi bagi umat Hindu, maka *dharma, Artha dan Kama* yang dinamakan juga *Tri Warga* dalam pelaksanaannya harus bergandengan erat dan bekerja sama, artinya tidak boleh lepas satu dengan yang lain, dalam arti bahwa *Dharma, Artha dan Kama* harus terjalin erat untuk mendapat *Moksa*. Hal ini selaras dengan penjelasan Kajeng (2005) tentang arti Sarasamuccaya 262 yang berbunyi: Demikianlah hakekatnya, maka hasil usaha tersebut dibagi tiga. Satu bagian untuk mencapai *dharma*, bagian yang kedua untuk memenuhi *kama*, bagian yang ketiga digunakan untuk melakukan usaha dalam bidang *artha* agar berkembang kembali.

Maka penghasilan yang diperoleh penggunaannya dibagi tiga oleh orang yang ingin memperoleh kebahagiaan (*Moksartham*).

Bab XIII Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa, Pasal 23 mengatur pembagian keuntungan bersih LPD pada akhir tahun pembukuan ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Cadangan Modal 60%
- 2) Dana Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 20%
- 3) Jasa Produksi 10%
- 4) Dana Pemberdayaan 5% atau paling banyak Rp 300.000.000, -
- 5) Dana Sosial 5%

Bila dikaitkan dengan teori keputusan keuangan dalam bentuk kebijakan deviden, apa yang tertuang dalam pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2017 tersebut adalah merupakan kebijakan deviden yang berlaku di LPD.

Konsep penggunaan laba tersebut, merupakan implementasi dari *Catur Purusa Artha*. Cadangan Modal 60% adalah merupakan perolehan Artha yang dipergunakan untuk kembali mencari Artha. Sebesar 20% setoran ke Desa Adat dan 5% untuk dana sosial merupakan Artha untuk *Dharma*. Sedangkan 10% Jasa Produksi adalah merupakan Artha untuk *Kama*. Jadi pengukuran indikator *Catur Purusa Artha* dalam penelitian ini mengacu pada Suhardana (2007) yang mengutip *Sarasamuccaya Sloka 262* yang menyebutkan pendayagunaan harta sebagai hasil dari jerih payah seseorang atau perusahaan yang dibagi tiga. Artha untuk Artha(Y1), Artha untuk *Dharma* (Y2) dan Artha untuk *Kama* (Y3).

Tabel 2. 1
Perbandingan Laba dan Implementasi Catur Purusa Artha

Perda Bali No.3 Thn. 2017	<i>Triple Bottom Line</i>	<i>Catur Purusa Artha</i>
Cadangan Modal 60%	<i>Profit</i>	<i>Artha</i>
Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 20%	<i>Planet</i>	<i>Dharma</i>
Jasa Produksi 10%	<i>People</i>	<i>Kama</i>
Dana Sosial 5%	<i>Planet</i>	<i>Dharma</i>

Sumber: Perda Bali, Elkington (1994), *Sarasamuccaya Sloka 262*

Konsep *Catur Purusa Artha* dalam pembagian laba perusahaan, sangat selaras dengan orientasi perusahaan yang mengarah kepada *Stakeholder Oriented* menuju *Sustainability Concept*. Suatu perusahaan dalam jangka panjang, atau demi keberlangsungan hidupnya (*Going Concern*), manajemen tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan pemilik perusahaan (*Shareholder*) saja, tetapi harus memperhatikan kepentingan seluruh pihak yang terkait (*Stakeholder*). Hanya dengan cara itu perusahaan akan dapat menjaga keberlangsungan hidupnya dalam jangka panjang.

Konsep *Catur Purusa Artha* menjadi proksi untuk mengukur keberlanjutan usaha LPD sesuai dengan teori John Elkington (1994). Berikut indikator-indikatornya:

- (1) Artha untuk Artha
- (2) Artha untuk Dharma
- (3) Artha untuk Kama

2.1.3 Kinerja Keuangan

Kinerja perusahaan adalah tingkat capaian prestasi perusahaan yang diukur dalam bentuk hasil-hasil kerja atau *performance out come* (Rue & Byard, 1977).

Menurut Bernadin *et al.* (1993) kinerja adalah hasil dari prestasikerja yang telah dicapai oleh seseorang karyawan sesuai dengan fungsi dan tugasnya pada periode tertentu. Crevans (1996) mengurai indikator pengukur kinerja adalah kepuasan, kesetiaan, pangsa pasar dan kemampuan menghasilkan laba. Glueck & Jauch (1998) menjelaskan kinerja perusahaan dapat dilihat dari tingkat penjualan, tingkat keuntungan, tingkat pengembalian modal, tingkat perputaran modal dan pangsa pasar yang diraihinya.

Guna mengidentifikasi seberapa besar pencapaian keuntungan perusahaan pada satu periode, lazimnya digunakan ukuran *Return on Investment (ROI)*, yaitu hasil perbandingan dari pendapatan sebelum pajak dengan aset total (Wheelen, 2003). Output perusahaan adalah merupakan pendapatan yang diterima dari perusahaan dan aset adalah input yang dimiliki oleh perusahaan. Maka dapat dikatakan ROI adalah sama dengan produktivitas, yaitu tingkat perbandingan output dengan input. Makin besar perbandingan antara output dengan input, makin besar pula produktivitas perusahaan tersebut.

2.1.3.1 Pengukuran Kinerja Keuangan Lembaga Keuangan Mikro

Pengukuran kinerja lembaga keuangan mikro juga dilihat dari kemampuan finansialnya untuk mencapai kemandirian (*self-sustainability*). Kemampuan finansial juga diartikan sebagai kemampuan untuk menutup biaya-biaya operasionalnya dengan pendapatan yang diterima. Efisiensi biaya harus menjadi perhatian utama untuk mencapai kemandirian keuangan bagi lembaga keuangan mikro (Khandler, 1998).

CAMEL hanya cocok dipergunakan sebagai alat ukur kinerja lembaga keuangan mikro yang tergolong sudah mandiri (*fully self-sufficient*). Marguerite (2001) dari *World Bank* mengelompokkan level keberlanjutan lembaga keuangan mikro menjadi tiga. Pertama, lembaga keuangan mikro yang pendapatannya hanya bisa menutupi biaya bunga atas sumber dana yang disalurkan tanpa bisa menutupi biaya operasionalnya. Kedua, lembaga keuangan mikro yang dengan pendapatan bunganya dapat menutupi biaya operasional tetapi tidak dapat menutupi biaya dana yang berasal dari sumber dana komersial. Ketiga, lembaga keuangan mikro yang telah mandiri (*Fully self-sufficient Institution*) yang demikian dia bisa menutupi semua biaya termasuk biaya risiko dan dapat menciptakan laba, walaupun lembaga keuangan mikro tersebut untuk menjaga keberlanjutannya tetap melaksanakan fungsi sosial.

Pemerintah federal Amerika pada tahun 1970 memperkenalkan CAMEL sebagai alat ukur kinerja bagi bank di negara tersebut. CAMEL kemudian tahun 1979 diadopsi oleh organisasi perbankan internasional (*Bank for International Settlement/BIS*) dan dimasukkan sebagai *Uniform Financial Institution Reporting Standard* (UFIRS) untuk mengukur kinerja bank. CAMEL kemudian dipergunakan untuk mengukur kinerja perbankan konvensional di banyak negara. Penggunaan CAMEL dinilai dapat mengukur kondisi keuangan bank dari berbagai dimensi yang sering menjadi perhatian pihak-pihak yang berkepentingan terhadap operasional sebuah bank. (Abdulazeez, 2017).

Pengukuran kinerja keuangan LPD mengacu pada UFIRS tersebut menggunakan pendekatan Permodalan, Kualitas Aset, Kemampulabaan dan

Likuiditas yang dalam istilah perbankan disebut *Capital, Assets, Earning, and Liquidity (CAEL)* yang diambil dari tingkat pengukuran kesehatan berupa *CAMEL* dimana M nya berarti *Management*. (Ramantha, 2018). Penilaian terhadap faktor permodalan LPD didasarkan pada rasio modal terhadap aktiva produktif menurut risiko. Modal adalah merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi LPD dalam rangka mengembangkan usaha, serta menjaga kemungkinan resiko kerugian, perlindungan terhadap dana nasabah dan resiko kredit macet. Konsep rasio permodalan yang cukup (*Capital Adequacy Ratio/CAR*) dipergunakan untuk mengukur kinerja pada bidang ini. CAR LPD dinilai baik bila mencapai minimum 8 persen. Modal sendiri (ekuitas) sangat penting bagi LPD untuk menjaga kontinuitas operasionalnya. Ekuitas juga dipergunakan untuk mengatur besaran investasi LPD dalam bentuk aktiva tetap. Besaran modal sendiri atau ekuitas ini juga menjadi aspek yang akan dinilai oleh masyarakat untuk berani menempatkan dananya di LPD.

Penyaluran dana kepada masyarakat merupakan kegiatan pokok bagi LPD dan sekaligus merupakan sumber pendapatan utama LPD. Guna mengukur kinerja LPD di bidang aset ini, kriteria yang digunakan adalah dengan menilai kualitas aktiva produktifnya. Caranya, dari sejumlah kredit yang tersalur pada setiap periode, terlebih dahulu diklasifikasikan menjadi kelompok lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. LPD untuk memperoleh nilai yang lebih baik dari segi kriteria aset, harus dapat menekan kelompok kreditnya yang bermasalah atau yang terkategori kurang lancar, diragukan dan macet. Kriteria ini pula mengharuskan LPD pada setiap periode menyisihkan sejumlah cadangan penghapusan piutang,

yang jumlahnya minimal sama dengan jumlah pinjaman macet pada periode tersebut. Kualitas aset mencerminkan keberlangsungan hidup LPD dalam jangka panjang. Aset produktif yang kurang lancar, apalagi macet akan mengancam keberlangsungan hidup LPD. Penyaluran kredit yang merupakan aktiva produktif, akan membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat pedesaan di seluruh Bali.

Kriteria kemampulabaan LPD dinilai dengan tiga aspek, antara lain: *Pertama*, terdapat rasio yang wajar antara laba dan pendapatan operasional. Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen LPD menjaga efisiensi usahanya. *Kedua*, terdapat rasio yang wajar antara laba dengan total kekayaan yang digunakan untuk memperoleh laba tersebut. Perbandingan antara laba dengan total kekayaan LPD yang dipergunakan untuk memperoleh laba, mencerminkan efektivitas penggunaan aset LPD. *Ketiga*, rasio positif yang wajar antara pendapatan operasional dengan biaya operasional. Kemampuan LPD untuk memperoleh keuntungan, atau kemampulabaannya dianggap penting karena melalui laba, LPD akan dapat memperluas jangkauan pelayanannya kepada masyarakat karena 60 persen laba LPD dipergunakan untuk menambah modal. Melalui laba pula LPD dapat melaksanakan fungsi sosialnya, baik untuk kepentingan individu masyarakat, maupun untuk kepentingan agama, karena 5 persen laba LPD untuk dana sosial dan 20 persen diserahkan kepada desa adat. Melalui laba LPD dengan demikian akan dapat mengimplementasikan *Catur Purusa Artha* secara periodik.

Kriteria likuiditas yang merupakan perbandingan antara kekayaan lancar dengan utang lancar, yang paling utama dinilai pada LPD adalah perbandingan antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima dari masyarakat (*Loan*

to Deposit Ratio). Penjagaan kondisi likuiditas, memegang peranan yang sangat penting pada setiap lembaga yang melakukan fungsi intermediasi keuangan. Kekayaan utama yang tidak berwujud dan tidak terukur bagi LPD adalah kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan dapat dijaga bila setiap saat nasabah perlu menarik simpanannya, selalu tersedia likuiditas yang cukup padakas LPD. Tidak ada satupun LPD yang akan mampu bertahan hidup tanpa, memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Lampiran III Peraturan Gubernur Bali No.44 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No.3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa yang memuat tata cara penilaian kesehatan LPD menetapkan lima faktor, yaitu (1) permodalan; (2) kualitas aktiva produktif; (3) manajemen; (4) earning atau rentabilitas; (5) likuiditas.

A. Penilaian terhadap Permodalan

$$\text{Rasio Kecukupan Modal} = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100$$

ATMR = Aktiva Tertimbang Menurut Risiko.

B. Penilaian terhadap Aktiva Produktif

$$1. \text{ Rasio KAP} = \frac{\text{Aktiva Produktif yg Diklasifikasikan}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 10$$

2. Penilaian Rasio Cadangan Pinjaman Ragu-Ragu

$$\text{Rasio CPRR} = \frac{\text{CPRR yang dibentuk}}{\text{CPRR yang wajib dibentuk}} \times 100\%$$

Rumus:

$$\text{Nilai CPRR} = \text{Rasio CPRR} \times 1$$

C. Penilaian Earning/Rentabilitas

1. *Return On Asset* (ROA)

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Tahun Berjalan}}{\text{Aset}}$$

$$\text{Nilai ROA} = \frac{\text{Rasio}}{0,025}$$

2. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

$$\text{Rasio BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai BOPO} = \frac{100 - \text{Rasio}}{0,25}$$

D. Penilaian terhadap Likuiditas

1. Rasio Alat Likuid

$$\text{Utang Lancar} = \frac{\text{Kas + ABA}}{\text{Rasio Alat Likuid}}$$

$$\text{Nilai Alat Likuid} = \frac{\text{Rasio}}{0,025}$$

2. *Loan to Deposit Ratio* (LDR)

$$\text{Rasio LDR} = \frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

$$\text{Nilai LDR} = (115 - \text{Rasio}) \times 4$$

2.1.4 Modal Struktural

Modal struktural menurut Bontis *et al.* (2000) terdiri dari semua pengetahuan non manusia yang mencakup database, proses, budaya organisasi, struktur organisasi, strategi proses manual, rutinitas dan kebijakan. Modal struktural adalah infrastruktur yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar. Termasuk dalam modal struktural adalah sistem

teknologi, sistem operasional perusahaan, merk dagang dan kursus pelatihan. Sebuah organisasi dengan modal struktural yang kuat, akan memiliki budaya yang mendukung yang memungkinkan individu untuk mencoba hal-hal yang gagal, belajar dan mencoba lagi. Modal struktural timbul dari proses dan nilai organisasi, yang mencerminkan fokus internal dan eksternal dari perusahaan, ditambah pengembangan dan pembaharuan nilai untuk masa depan. Modal struktural menurut Stewart (1999) adalah Infrastruktur pendukung, proses dan basis data organisasi yang memungkinkan modal insani dalam menjalankan fungsinya.

Halim (2010) mendefinisikan modal struktural sebagai apa yang terjadi antara orang-orang, bagaimana orang-orang yang terhubung dalam perusahaan, dan apa yang tetap ketika karyawan meninggalkan perusahaan. Kamukama (2010), menyebutkan bahwa beberapa aspek untuk mengukur modal struktural termasuk budaya organisasi, orientasi terhadap kualitas, inovasi, perbaikan terus menerus, sistem informasi dan kerjasama tim. Organisasi dengan keseluruhan modal struktural akan memiliki budaya sportif yang memungkinkan individu untuk mencoba hal-hal yang baru, mempelajarinya dan siap untuk gagal. Ditinjau dari tingkat analisis organisasional, maka modal struktural berhubungan dengan kinerja perusahaan. Penelitian Ulum, dkk. (2014) dengan judul *Intellectual Capital Performance of Indonesian Banking Sector: A Modified VAIC (M-VAIC) Perspective*, salah satu kesimpulannya menjelaskan bahwa modal struktural merupakan variabel yang kuat yang menjelaskan *Modified Value Added Intellectual Capital*. Penelitian yang dilakukan oleh Hejazi *et al.* (2016) pada salah satu kesimpulannya menunjukkan hasil yang sama.

2.1.4.1 Dimensi Modal Struktural

Modal struktural menurut Kamukama (2010) terdiri dari enam indikator yaitu, budaya perusahaan, kerjasama internal dan transfer pengetahuan, instrumen kepemimpinan, teknologi informasi, dan pengetahuan eksplisit inovasi produk, optimasi proses, dan inovasi. Modal struktural terdiri atas proses dan nilai dari sebuah organisasi yang menunjukkan ciri khas internal dan eksternal organisasi yang bersangkutan beserta modal pengembangannya di masa yang akan datang.

Moon dan Kym (2006) menyebut ada tiga dimensi dan masing-masing dimensi memiliki tiga indikator tentang modal struktural yaitu:

- 1) Dimensi Budaya Organisasi dengan indikator
 - (a) paham visi, misi dan tujuan perusahaan.
 - (b) mengerti sistem dan fungsi perusahaan.
 - (c) paham operasional/*knowledge sharing*.
- 2) Dimensi Kekayaan Intelektual dengan indikator
 - (a) keunggulan daya saing.
 - (b) memiliki karyawan yang inovatif.
 - (c) memiliki database sistem informasi.
- 3) Dimensi Proses Operasional/Struktur Organisasi dengan indikator
 - (a) struktur organisasi yang baik.
 - (b) efisien dalam proses pelayanan.
 - (c) sumber daya pengetahuan (informasi).

Modal struktural dalam penelitian ini mengacu pada konsep Moon (2006), Christa (2011) dan Ulum (2015). Modal struktural diformulasikan dengan dua dimensi, yaitu budaya organisasi dan struktur organisasi.

2.1.5 Modal Sosial

Teori modal sosial kali pertama dipicu oleh tulisan Bourdieu yang dipublikasikan pada akhir tahun 1970an (Fine dan Lapavitsas, 2004). Judul tulisannya *Le Capital Social: Notes Provisoires* yang diterbitkan dalam *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*. Karena publikasiannya dalam bahasa Prancis, menyebabkan tidak banyak ilmuwan sosial maupun ekonomi yang menaruh perhatian. Publikasi yang dilakukan Coleman (2009) pada topik yang sama telah menginspirasi para intelektual mengunduh tema tersebut sebagai suatu diskusi penting dan banyak yang mengatakan bahwa Coleman merupakan ilmuwan pertama yang memperkenalkan konsep modal sosial. Tulisan Coleman itu dipublikasikan di *American Journal of Sociology* dengan judul *Social Capital in the Creation of Human Capital*. Poldan (2004) menyebut modal sosial sangat dekat untuk menjadi konsep gabungan bagi seluruh disiplin ilmu sosial. Berbeda dengan dua modal lainnya yang lebih dulu populer dalam bidang ilmu sosial, yakni modal ekonomi (*economic/ financial capital*) dan modal manusia (*humancapital*). Modal sosial baru eksis bila ia berinteraksi dengan struktur sosial. Modal ekonomi yang dimiliki oleh seseorang atau perusahaan dapat membuat perusahaan melakukan kegiatan ekonomi tanpa terpengaruh oleh struktur sosial, demikian pula dengan modal manusia.

Porter (1980) mengemukakan bahwa modal sosial (*social capital*) merupakan kemampuan seorang untuk memperoleh manfaat dengan kebaikan dari keanggotaan didalam jaringan sosial atau struktur sosial lainnya. Bourdieu (1980) mengatakan modal sosial merupakan keseluruhan sumber konsep aktual atau potensial, yang dihubungkan dengan kepemilikan dari suatu jaringan yang tahan lama atau hubungan timbal balik antar institusi yang dikenalnya. Prusak (2001) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu kesediaan melakukan hubungan aktif meliputi kepercayaan, kerjasama yang saling menguntungkan, berbagi nilai dan perilaku yang mengikat setiap anggota jaringan.

Tiga unsur utama dalam modal sosial adalah *trust* (kepercayaan), *reciprocal* (timbal balik), dan interaksi sosial. Kepercayaan dapat mendorong seseorang untuk bekerjasama dengan orang lain untuk memunculkan aktivitas ataupun tindakan bersama yang produktif. Kepercayaan merupakan produk dari norma-norma sosial cooperation yang sangat penting yang kemudian menunculkan modal sosial. Fukuyama (2002), menyebutkan kepercayaan sebagai harapan-harapan terhadap keteraturan, kejujuran, perilaku kooperatif yang muncul dari dalam sebuah komunitas yang didasarkan pada norma-norma yang dianut bersama anggota komunitas-komunitas itu. Kepercayaan bermanfaat untuk mengurangi biaya.

Wailis *et al.*, 2004 menyebut modal sosial sangat dekat untuk menjadi konsep gabungan bagi seluruh disiplin ilmu sosial. Berbeda dengan dua modal lainnya yang lebih dulu populer dalam bidang ilmu sosial, yakni modal ekonomi (*economic/financial capital*) dan modal manusia (*human capital*), modal sosial baru eksis bila ia berinteraksi dengan struktur sosial. Sifat ini berbeda dengan modal

ekonomi atau modal finansial dan modal manusia, dengan modal ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan dapat melakukan kegiatan ekonomi tanpa harus terpengaruh dengan struktur sosial, demikian pula dengan modal manusia.

Robert Putnam (1993) mengemukakan modal sosial lebih menunjuk pada bagian-bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang memungkinkan orang dapat bekerjasama. Coleman (2009) mendefinisikan modal sosial berdasarkan fungsinya. Menurutnya, modal sosial bukanlah entitas tunggal, tetapi entitas majemuk yang mengandung dua elemen, yaitu modal sosial mencakup beberapa aspek dari struktur sosial dan modal sosial memfasilitasi tindakan tertentu dari pelaku, baik individu maupun perusahaan di dalam struktur tersebut.

Coleman (2009) menyebut setidaknya ada tiga bentuk modal sosial, yaitu *Pertama*, ekspektasi (*expectations*) dan kepercayaan (*trustworthiness*). Pada konteks ini, bentuk modal sosial tergantung pada dua elemen kunci: kepercayaan dari lingkungan sosial dan perluasan aktual dari kewajiban yang sudah dipenuhi (*Obligation held*). Pada perspektif ini, individu yang bermukim dalam struktur sosial dengan saling kepercayaan tinggi memiliki modal sosial yang lebih baik daripada situasi sebaliknya. *Kedua*, jaringan informasi (*information channels*). Informasi sangat penting sebagai basis tindakan, namun harus disadari bahwa informasi tersebut mahal. Pada level yang paling minimum, ini perlu mendapatkan perhatian, bahwa informasi selalu bersifat terbatas. Tentu saja individu yang memiliki jaringan yang lebih luas akan lebih mudah untuk memperoleh informasi sehingga dapat dikatakan modal sosialnya tinggi, demikian pula sebaliknya. *Ketiga*, norma dan sanksi yang efektif. Norma dalam sebuah komunitas yang mendukung individu

untuk memperoleh prestasi (*achievement*) tentu saja dapat digolongkan sebagai bentuk modal sosial yang sangat penting.

Modal sosial merupakan entitas yang mencakup multi aspek dari struktur sosial. Modal sosial memfasilitasi tindakan tertentu pelaku, baik individu maupun organisasi dalam struktur tersebut. Woolcok (1998) menjelaskan modal sosial adalah informasi, kepercayaan dan norma dari timbal balik yang melekat dalam jaringan sosial. Modal sosial mengacu pada ciri-ciri organisasi sosial seperti jaringan, norma dan kepercayaan yang memudahkan koordinasi dan kerjasama saling menguntungkan. Modal sosial juga menambahkan elemen-elemen subyektif, proses budaya seperti kepercayaan dan norma dari timbal balik yang memfasilitasi modal sosial.

2.1.5.1 Dimensi Modal Sosial

Nahapiet & Ghosal (1998) menjelaskan ada tiga dimensi modal sosial yang masing-masing terdiri atas:

- 1) Dimensi Relasional dengan parameter:
 - a. terampil bekerjasama
 - b. berbagi informasi.
- 2) Dimensi Struktural dengan parameter
 - a. tunduk terhadap norma perusahaan
 - b. interaksi dan bertukar pikiran.
- 3) Dimensi Kognitif dengan parameter:
 - a. paham tujuan dan nilai-nilai perusahaan
 - b. komitmen untuk tujuan bersama.

Penelitian yang dilakukan oleh Ambara (2012) menunjukkan bahwa modal sosial yang berkembang di masyarakat memiliki peran positif dalam mendukung pengelolaan LPD. Dengan modal sosial yang dimiliki, timbul rasa kebersamaan dan rasa ikut memiliki dari masyarakat terhadap Desa Adat yang menaungi LPD. Rasa kebersamaan itu ada mulai dari rekrutmen pengurus dan pengawas LPD, sampai pada operasional LPD, baik dalam menghimpun dana masyarakat, maupun dalam menyalurkannya kembali ke masyarakat. Keberadaan modal sosial berupa kepercayaan antar LPD dengan masyarakatnya sampai menjadikan LPD tertentu berani mengeluarkan kredit tanpa agunan dalam batasan tertentu. Modal sosial juga sangat berperan dalam kolektibilitas kredit macet. Penerapan sanksi adat dan kebiasaan warga untuk terhindar dari rasa malu terhadap khalayak ramai apabila diketahui menunggak di LPD serta memfasilitasi kepatuhan warga terhadap kewajiban transaksi.

Dalam penelitian ini pengukuran modal sosial menggunakan dimensi, yakni hubungan sosial/dimensi relasional atau interaksi dengan masyarakat dan dimensi kognitif atau interaksi dengan desa adat dan banjar adat. Interaksi sosial antara individu yang terlibat dalam LPD dengan individu masyarakat sekitarnya terjadi hampir setiap hari tanpa terikat dengan hari kerja dan hari libur. Interaksi sosial justru banyak terjadi pada saat hari raya atau hari suci keagamaan yang di tingkat desa adat hampir berlangsung setiap bulan. Demikian pula interaksi sosial antara LPD dengan desa adat dan banjar adat. Dalam praktiknya banyak LPD yang telah mampu melakukan interaksi sosial dengan masyarakat melalui sponsorship, baik dibidang olah raga, kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial lainnya.

Dimensi relasional atau interaksi dengan masyarakat dalam penelitian ini diukur dengan indikator:

1. Pengurus dan Karyawan LPD terampil bekerjasama dengan masyarakat sekitarnya
2. Pengurus dan Karyawan LPD saling berbagi informasi dan belajar dari satu sama lain

Dimensi Kognitif atau tujuan bersama desa adat dan banjar adat dalam penelitian ini diukur dengan indikator:

1. Pengurus dan Karyawan LPD paham dan punya persepsi yang jelas tentang tujuan dan nilai-nilai LPD
2. Pengurus dan Karyawan LPD memiliki komitmen untuk mencapai tujuan bersama

2.1.6 Modal Reputasi

Grant (1997) mendefinisikan sumber daya reputasi sebagai persepsi masyarakat terhadap perusahaan atau sebagai determinasi persepsi loyalitas konsumen terhadap produk perusahaan. Sumber daya reputasi sangat erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Kepercayaan merupakan sebuah *mutual faithfulness* yang mana semua relasi sosial bergantung padanya (Simmel, 1990). Kepercayaan juga merupakan sebuah dasar perilaku, yang memotifasi loyalitas dan hubungan yang berdasarkan solidaritas (Parson, 1970). Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan elemen utama dalam

mengembangkan hubungan sosial yang harmonis dalam sebuah kelompok ataupun masyarakat yang pada akhirnya membentuk sumberdaya reputasi bagi perusahaan.

Kepercayaan merupakan kesediaan salah satu pihak untuk menjadi rentan atau berisiko oleh tindakan pihak lain yang dipercayai, dimana kesediaan ini didasarkan oleh harapan bahwa pihak lain tersebut akan melakukan hal yang penting bagi pihak yang mempercayai, terlepas dari kemampuan untuk mengontrol atau mengawasi pihak yang dipercayai (Mayer, *et al.*, 1995). Mengacu pada definisi tersebut, terkandung aspek risiko yang bersedia ditanggung oleh pihak yang mempercayai. Tidak hanya aspek risiko, dalam kepercayaan juga terdapat pengumpulan dan analisis informasi tentang pihak yang dipercayai. Ada tiga hal penting dalam kepercayaan yaitu hubungan relasi, informasi dan kesediaan menanggung risiko.

Mayer *et al.*, (1995) mengukur kepercayaan yang kemudian membentuk reputasi dengan tiga faktor, yaitu: *ability*, *benevolence* dan *integrity*. *Ability* adalah gabungan dari keterampilan, kompetensi, dan karakteristik spesifik yang dibutuhkan seseorang untuk mengerjakan atau melakukan sesuatu pada bidang tertentu. *Ability* dinilai oleh orang yang memberikan kepercayaan berdasarkan hubungan relasi serta informasi yang dikumpulkannya terkait pihak yang dipercayai dan digunakan sebagai dasar meletakkan kepercayaan. *Benevolence* berarti kebijakan atau kebaikan hati. *Benevolence* merupakan ukuran sejauh mana keinginan pihak yang dipercayai untuk berbuat baik kepada pihak yang mempercayai, diluar dari keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau perusahaan. *Integrity* melibatkan persepsi pihak yang mempercayai, bahwa pihak

yang dipercayai akan memenuhi prinsip-prinsip yang bisa diterima kedua belah pihak dalam hubungan kepercayaan.

Kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dana, baik tabungan maupun deposito di LPD lebih didasari oleh *ability*, *benevolence* dan *integrity*. Karena itu, walaupun hingga kini dana masyarakat yang tersimpan di LPD tidak dijamin oleh lembaga penjamin simpanan (LPS) seperti di perbankan, masyarakat tetap percaya menempatkan dananya di LPD melebihi jumlah dana masyarakat yang disimpan di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Penempatan dana oleh masyarakat di LPD lebih banyak didasari oleh kepercayaan mereka bahwa LPD adalah milik masyarakat sendiri dan LPD dapat mereka kontrol setiap rapat tahunan pemilik melalui *paruman* desa adat.

Kepercayaan masyarakat terhadap kemudahan pelayanan kredit LPD, serta manfaat ekonomisnya bagi masyarakat juga sangat tinggi. Tidak hanya mendapat pelayanan yang relatif cepat dibidang perkreditan. Bunga kredit yang dibayarkan oleh masyarakat pada akhirnya dipercayai akan kembali memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat. Bagian laba LPD yang 20 persen disetor ke desa adat telah meringankan masyarakat dalam membayar iuran-iuran untuk kepentingan komunitas adat.

2.6.1 Dimensi Modal Reputasi

Kepercayaan juga merupakan sebuah dasar perilaku, yang memotifasi loyalitas dan hubungan yang berdasarkan solidaritas (Parson, 1970). Dapat disimpulkan bahwa kepercayaan merupakan elemen utama dalam mengembangkan

hubungan sosial yang harmonis dalam sebuah kelompok ataupun masyarakat yang pada akhirnya membentuk sumberdaya reputasi bagi perusahaan.

Sumberdaya reputasi dalam penelitian ini diukur menggunakan dua indikator, yakni kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dana, baik tabungan maupun deposito di LPD dan kepercayaan masyarakat terhadap kemudahan pelayanan kredit serta manfaat ekonomisnya bagi masyarakat.

- a) Dimensi kepercayaan masyarakat untuk menempatkan dana diukur dengan indikator:
 - a) Masyarakat percaya bahwa dananya akan aman bila disimpan di LPD
 - b) Masyarakat percaya akan dapat menerima bunga yang menguntungkan dari LPD
 - c) Masyarakat percaya penarikan dana nasabah tidak berbelit-belit
- b) Dimensi kepercayaan masyarakat terhadap kemudahan pelayanan kredit serta manfaat ekonomisnya bagi mereka diukur dengan indikator:
 - a) Masyarakat percaya mencari kredit mudah di LPD
 - b) Masyarakat percaya suku bunga kredit tidak mahal di LPD
 - c) Masyarakat percaya keuntungan LPD akan meringankan beban masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pembahasan penelitian terdahulu dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan suatu gambaran mengenai bukti-bukti empiris terhadap dengan

variabel yang diteliti dalam penelitian dan juga menjadi acuan dalam mengembangkan hipotesis.

Tabel 2.2
Mapping Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul	Variabel	Temuan
1	Barney, J.B., 1991	<i>Firm Resources and Sustained Competitive Advantage.</i>	<i>Intellectual Capital sebagai variabel bebas</i>	Modal Intelektual yang terdiri dari <i>Human Capital, Customer Capital dan Social Capital</i> , mampu meningkatkan keunggulan bersaing
2	Anuonye, N.Ben. 2016.	<i>Effect of Intellectual Capital on Return on Asset of Insurance firms in Nigeria</i>	<i>Human Capital, Social Capital, Structural Capital and ROA</i>	Modal Intelektual dapat meningkatkan kinerja Perusahaan Asuransi
3	Boekestain, B. 2006.	<i>The Relation Between Intellectual Capital and Intangible Assets of Pharmaceutical Companies</i>	<i>Human Capital, Social Capital, Structural Capital, Relational capital and ROI</i>	Modal Intelektual yang terdiri dari <i>Human Capital, Social Capital, Struktural Capital, Relational Capital</i> berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROI
4	Cabrita, Maria do Rosario, and Bontis, Nick, 2008.	<i>Intellectual Capital and Business Performance in the Portuguese Banking Industries.</i>	<i>Human Capital, Social Capital, and, Relational capital and Banking Performance</i>	Seluruh komponen Intelektual Kapital berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan di Portugal
5	Puntilio, 2009	<i>Intellectual Capital and Business Performance</i>	<i>Value Added Intellectual Capital and ROI, ROA</i>	<i>Value Added Intellectual Capital</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan ROI, ROA
6	Fatoki, O., 2011.	<i>The Impact of Human Capital, Social and Financial Capital on The Performance of Small and Medium-</i>	<i>Human Capital, Social and Financial Capital on The Performance</i>	<i>Human Capital dan Financial Capital</i> berpengaruh positif terhadap kinerja UMKM di Afrika Selatan

No	Penulis	Judul	Variabel	Temuan
		<i>Sized Enterprises (SMEs) in South Africa</i>		
7	Kamath G. Bharathi, 2010	<i>The Intellectual Capital Performance of Banking Sector in Pakistan</i>	<i>Intellectual, Human and Structural Capital Effects to ROA and ROE</i>	<i>Intellectual Capital</i> berpengaruh positif terhadap ROA dan ROE Perbankan di Pakistan
8	Amrizah, K., & Nawal, K. 2013.	<i>The Relationship between Human Resource Management and Islamic Microfinance Providers Performance : The Mediating Role of Human Capital.</i>	<i>HRM, Human Capital, CAMEL</i>	<i>Human Capital</i> mampu memediasi hubungan Manajemen Sumber Daya Manusia dengan Kinerja Lembaga Keuangan Mikro
9	Kuo-An Tseng, Yu-Wen Lan, Hao-Chun Lu and Yu Chen, 2013	<i>Mediation of Strategy on Intellectual Capital and Performance</i>	<i>Human Capital Cost, R&D Cost, Marketing Cost and ROA</i>	Modal Intelektual serta seluruh komponennya berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan
10	Santi Gopal Maji Mitra Goswami, 2016	<i>Intellectual Capital and Firm Performance in Emerging Economies: The Case of India.</i>	<i>ROA, Value Added Intellectual Capital (VAICTM), Intellectual Capital Efficiency (ICE), Human Capital Efficiency (HCE), Structural Capital Efficiency (SCE), Capital Employee Efficiency (CEE), Leverage.</i>	ICE, CEE dan HCE berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan SCE tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. ICE lebih tinggi pada perusahaan yang berbasis pengetahuan dibandingkan dengan yang tradisional
11	Vincenzo Scafarto Federica, Ricci Francesco Scafart, 2016	<i>Intellectual Capital and Firm Performance in the Global Agribusiness Industry: The</i>	<i>Asset Turn Over (ATO), ROE, ROA, ROI, Human Capital</i>	Human Capital berpengaruh negatif terhadap Asset Turn Over, sedangkan pada kinerja

No	Penulis	Judul	Variabel	Temuan
		<i>Moderating Role of Human Capital</i>	<i>(HC), Innovation Capital (InnC), Process Capital (PrC), Relation Capital (RC), Leverage</i>	lainnya tidak berpengaruh. InnC tidak berpengaruh terhadap kinerja, sedangkan <i>Process Capital</i> dan <i>Relation Capital</i> berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
12	Phetsathaphone Keovongvichich, 2012	<i>An Analysis of the Recent Financial Performance of the Laotian Banking Sector during 2005-2010 in Laos</i>	<i>Capital adequacy, Asset quality, Management, Earning ability dan Liquidity</i>	Berdasarkan analisis CAMEL bank di Laos dikategorikan memiliki kinerja yang baik.
13	Amitava Mondal, Santanu, Kumar Ghosh, 2012.	<i>Intellectual capital and financial performance of Indian banks</i>	<i>Value Added Intellectual Capital (VAICTM) Intellectual Capital Efficiency (ICE), Human Capital Efficiency (HCE), Struktural Capital Efficiency (SCE), Capital Employee Efficiency (CEE), CAMEL</i>	Seluruh komponen IC: SCE, ICE, CEE dan HCE memiliki nilai tambah (VAIC TM) dan dapat meningkatkan kinerja bank yang diukur dengan CAMEL.
14	Parvesh Kumar Aspal and Senjeev Dhawan, 2016	<i>Camels Rating Model for Evaluating Financial Performance of Banking Sector: A Theoretical Perspective</i>	<i>CAMELS (Capital adequacy, Asset quality, Management, Earnings dan Liquidity, Systems)</i>	CAMEL dapat dipergunakan sebagai pengukuran kinerja perbankan di India
15	Ihyaual Ulum, Imam Ghozali, dan Agus Purwanto, 2014	<i>Intellectual Capital Performance of Indonesian Banking Sector: A Modified</i>	<i>M-VAIC: Capital Employee Efficiency (CEE), Human Capital</i>	<i>Human Capital, Social Capital dan Struktural Capital</i> merupakan variabel kuat yang menjelaskan M-VAIC.

No	Penulis	Judul	Variabel	Temuan
		<i>VAIC (M-VAIC) Perspective.</i>	<i>Efficiency (HCE), Structural Capital Efficiency (SCE), Relation Capital Efficiency (RCE)</i>	Relational Capital memiliki R ² lebih rendah.
16	Astawa, Putu., 2012.,	Kepemilikan Institusi dan Nilai-Nilai Harmoni dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa di Provinsi Bali	Kepemilikan Institusi, Tri Hita Karana, ROA	Kepemilikan Institusi dan Budaya Harmoni dalam bentuk Implementasi Tri Hita Karana dapat meningkatkan Kinerja Keuangan LPD di Provinsi Bali
17	Suarmanayasa, I Nengah 2016.	Pengaruh Modal Sosial, Partisipasi Masyarakat, dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Terhadap Keberhasilan Pembangunan Pedesaan di Provinsi Bali	Modal Sosial, Partisipasi Masyarakat, Kinerja LPD, Pembangunan Pedesaan	Modal Sosial berpengaruh langsung positif dan signifikan terhadap Partisipasi Masyarakat. Modal Sosial secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja LPD. Partisipasi Masyarakat secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja LPD. Kinerja LPD secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pembangunan Pedesaan. Dengan dimediasi oleh Partisipasi Masyarakat, Modal Sosial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja LPD. Dengan dimediasi oleh Kinerja LPD dan Partisipasi Masyarakat, Modal Sosial berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Pedesaan. Dengan

No	Penulis	Judul	Variabel	Temuan
				dimediasi oleh Kinerja LPD, Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan terhadap Pembangunan Pedesaan.
18	Chaves, Radrigo A & Claudio Gonzales-Vega, 2006	<i>The Design on Successful Rural Financial Intermediaries Lembaga Perkreditan Desa (LPD): Evidence from Indonesia</i>	<i>Fenomenological Study</i>	Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dengan berpedoman pada prinsip-prinsip dan budaya lokal dapat memajukan intermediasi keuangan pedesaan.

